

# **Perubahan Rencana Strategis (Renstra)**

Kapanewon Dlingo

Tahun 2021-2026

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2019, Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunandaerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Dlingo di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pembentukan awal Kapanewon Dlingo berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang:

Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Dlingo, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Dlingo yang terdiri dari 6 Kalurahan yaitu: Kalurahan Mangunan, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Terong.

Kapanewon Dlingo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  - g. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- n. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program , kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi , yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Dlingo dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Dlingo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

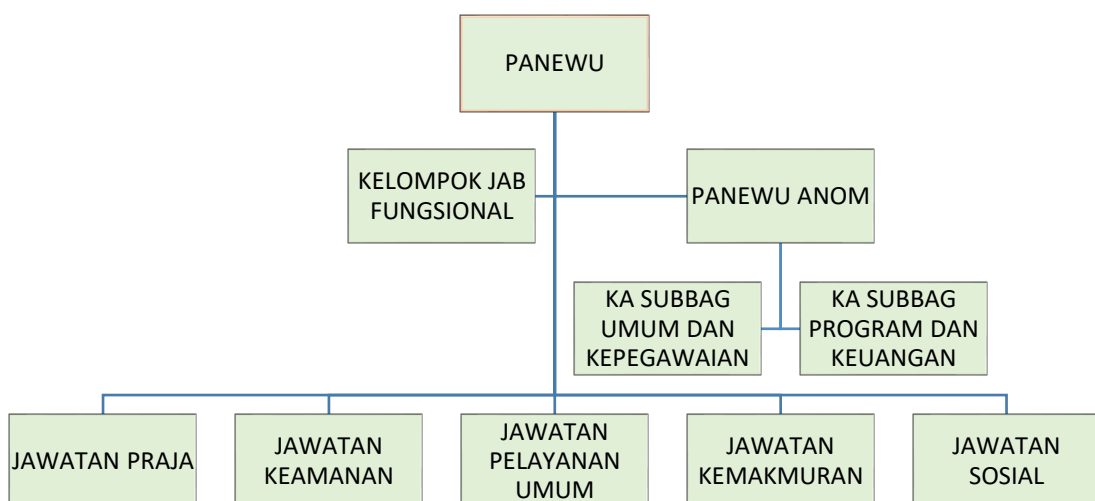
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Pemerintahan;
- c. Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Jawatan Pelayanan;
- e. Jawatan Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:



*Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo*

## **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
  - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
  - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
  - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
  - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
  - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
  - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
  - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
  - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
  - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
  - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
  - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data

dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
- (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
- (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Praja**

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan

Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

- (3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
  - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :

- i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah kabupaten;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
  - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
  - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
  - vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
  - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Keamanan**

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
  - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
  - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **Jawatan Pelayanan Umum**

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
  - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
  - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
  - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
  - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
  - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
  - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
  - (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
  - (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
  - (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
  - (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
  - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
  - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Kemakmuran**

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
  - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
  - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
  - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
  - (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
  - (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
  - (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
  - (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Jawatan Sosial**

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
  - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
  - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
  - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
  - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
  - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Dlingo sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Dlingo per April 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 11 orang jabatan fungsional umum. ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kondisi Jabatan

NO	JABATAN	Pendidikan	Keterangan
1	<b>Panewu</b>	<b>S1/S2</b>	<b>Terpenuhi</b>
2	<b>Panewu Anom</b>	<b>S1/S2</b>	<b>Terpenuhi</b>
3	<b>Ka jawatan Pelayanan Umum</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
4	Pengelola pelayanan	D3	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
6	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
7	<b>Ka Jawatan Praja</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
8	Analisis pemerintahan	S1	Belum Terpenuhi
9	Pengadministrasi Umum/Bendahara gaji	SMA	Terpenuhi
10	<b>Ka Jawatan Kemakmuran</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
11	Analisis Ekonomi Pembangunan	S1	Terpenuhi
12	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
13	<b>Ka Jawatan Sosial</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
14	Analisis Kemasyarakatan	S1	Terpenuhi
15	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
16	<b>Ka Jawatan Keamanan</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
17	Analisis Keamanan	S1	Terpenuhi
18	Pengadministrasi Umum/ Bnedahara Barang	SMA	Terpenuhi
19	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
20	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
21	<b>Kasubag Program dan Keuangan</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
22	Pengadministrasi Umum/ Bendahra Keuangan	SMA	Terpenuhi
23	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S1	Belum Terpenuhi
24	Verifikator Keuangan	D3	Belum Terpenuhi
25	<b>Kasubag Umum</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
26	analisis SDM Aparatur	S1	Terpenuhi
27	Pengadministrasi Umum	SMA	Belum Terpenuhi
28	Pramu Bhakti/ Penyimpan Barang	SMP	Terpenuhi
29	Arsiparis	D3	Terpenuhi
30	Tenaga Kontrak Kebersihan	SMA	Terpenuhi

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Dari tabel diatas di beberapa jawatan masih belum terpenuhi diantaranya Jawatan Pelayanan masih membutuhkan Pengelola Pelayanan dan Jawatan Praja masih membutuhkan analisis pemerintahan, pada sekretariat yang belum terpenuhi adalah analisis perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Verifikator Keuangan, hal ini tentunya menjadi kendala bagi kpanewon sehingga beberapa jabatan masih merangkap untuk

melaksanakan tupoksi yang masih belum terpenuhi, efisiensi SDM dan memaksimalkan tupoksi SDM.

Tabel 2.2.1.1 Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan			Jenis Kelamin	
	IV	III	II	L	P
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	1	1	-
SMA/SMK	-	-	8	7	1
D3	-	-	1	1	-
S1	-	8	-	5	3
S2	2	1	-	2	-

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2022

## 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Aset Kapanewon Dlingo

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1	Sepeda motor	6	6	0	9	3
	2	Mobil Dinas	1	1	0	1	0
II. Komputer	1	Komputer	12	8	4	15	3
III. Lap Top	1	Laptop	14	9	5	14	0
IV. AC	1	AC	9	9	0	11	2
V. Meja Komputer	1	Meja Komputer	17	10	7	20	10
VI. Kursi Lipat	1	Kursi Rapat	54	30	14	120	90
VII. Alat Pendingi	1	Kulkas	2	2	0	3	1
VIII. Filing Kabinet	1	Filing Kabinet	3	3	0	10	7
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	3	3	0	7	4

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	7	7	0	17	10
XI. Printer	1	Printer	9	9	3	14	5
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	4	4	0	5	1
XIII. Blower	1	LC	1	1	0	2	1
XIV. LCD	1	LCD	2	2	0	3	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	0	2	0
XVIII. CCTV	1	CCTV	3	3	0	8	5
XIX. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	2	0	6	4

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kebutuhan komputer yang masih belum terpenuhi, yaitu 9 unit di antaranya pada jawatan keamanan 1 unit, jawatan pelayanan 2 unit, jawatan sosial 1 unit, jawatan Praja 1 Unit, Jawatan Kemakmuran 1 unit dan sekretariat 3 unit, sementara komputer dan laptop yang tidak bisa digunakan yaitu untuk computer pada jawatan Kemakmuran 1 unit jawatan sosial 1 unit jawatan Ketertiban 1 unit dan jawatan pelayanan 1 unit.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Dlingo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Dlingo tiap tahunnya, dilihat dari Rasio Capaiannya yang meningkat tiap tahunnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Dlingo untuk lebih

meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Dlingo.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Dlingo dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala dan dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun factor penghambat caaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
A	Indikator tujuan																			
	Terciptanya sumberdaya aparatur yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat																			
B	Indikator sasaran																			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00	
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00	
2017-2018																				
c		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
		Jumlah rapat,sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	<b>Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.</b>	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	-
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantuan ekspso	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	-
	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	<b>Cakupan pembinaan Sosial Masyarakat</b>		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor Pemberantasan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Penyakit Masyarakat																		
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan</b>		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	dan pemantauan lokasi rawan bencana																		
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
<b>2019-2020</b>																			
	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	-	75 persen	76 persen	77 persen	78 persen	-	-	75 persen	76 persen	94,39 persen	85 persen	-	-	100%	100%	123%	122%	-
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-
	dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
	dokumen evaluasi	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	-	100%	-
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	-	-	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	-	-	-	101%	-	-
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jenis layanan yang diberikan				16 jenis						16 jenis							100%		
	Mayarakat yang dilayani				4000 orang						4000 orang							100%		
	<b>cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah kegiatan gebyar	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	budaya daerah																		
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umumdi Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	<b>100%</b>	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-	-



No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Keamanan Lingkungan																		
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat</b>	-	-	-	<b>90 persen</b>	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	<b>90 persen</b>	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100 persen%</b>	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	<b>Tingkat Kecamatan</b>																		
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba kecamatan / desa	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberdayaan perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-









No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (persen)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	ngan bencana																		
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

### 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak langsung	1.121.847.600	1.115.311.000	1.064.274.049	1.111.096.517	1.178.850.599	-	1.084.354.986	1.009.512.976	993.276.445	1.028.652.205	1.044.964.100	-	96,7%	90,5%	93,3%	92,6%	88,6%	-
2	Belanja Langsung	636.924.000	811.026.500	829.049.100	804.540.900	680.000.000	-	608.954.300	809.387.800	827.974.301	802.675.423	673.020.099	-	95,61%	99,80%	99,87%	99,77%	98,97%	-
3	Belanja Pegawai	57.840.000	44.640.000	91.730.000	95.030.000	96.580.000	-	32.400.000	44.640.000	91.730.000	95.030.000	96.580.000	-	56,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	-
4	Belanja Barang jasa	457.808.450	714.057.000	689.319.100	654.005.400	545.070.000	-	461.560.750	712.418.300	688.244.301	652.139.923	538.090.099	-	100,8%	99,8%	99,8%	99,7%	98,7%	-
5	Belanja Modal	121.275.550	52.329.500	48.000.000	55.505.500	38.350.000	-	114.993.550	52.329.500	48.000.000	55.505.500	38.350.000	-	94,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	-
	Belanja:						3.000.829.779						3.000.829.779						100%
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	2.985.951.779	-	-	-	-	-	2.985.951.779	-	-	-	-	-	100%
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	14.878.000	-	-	-	-	-	14.878.000	-	-	-	-	-	100%

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Dlingo antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganannya covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Dlingo dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

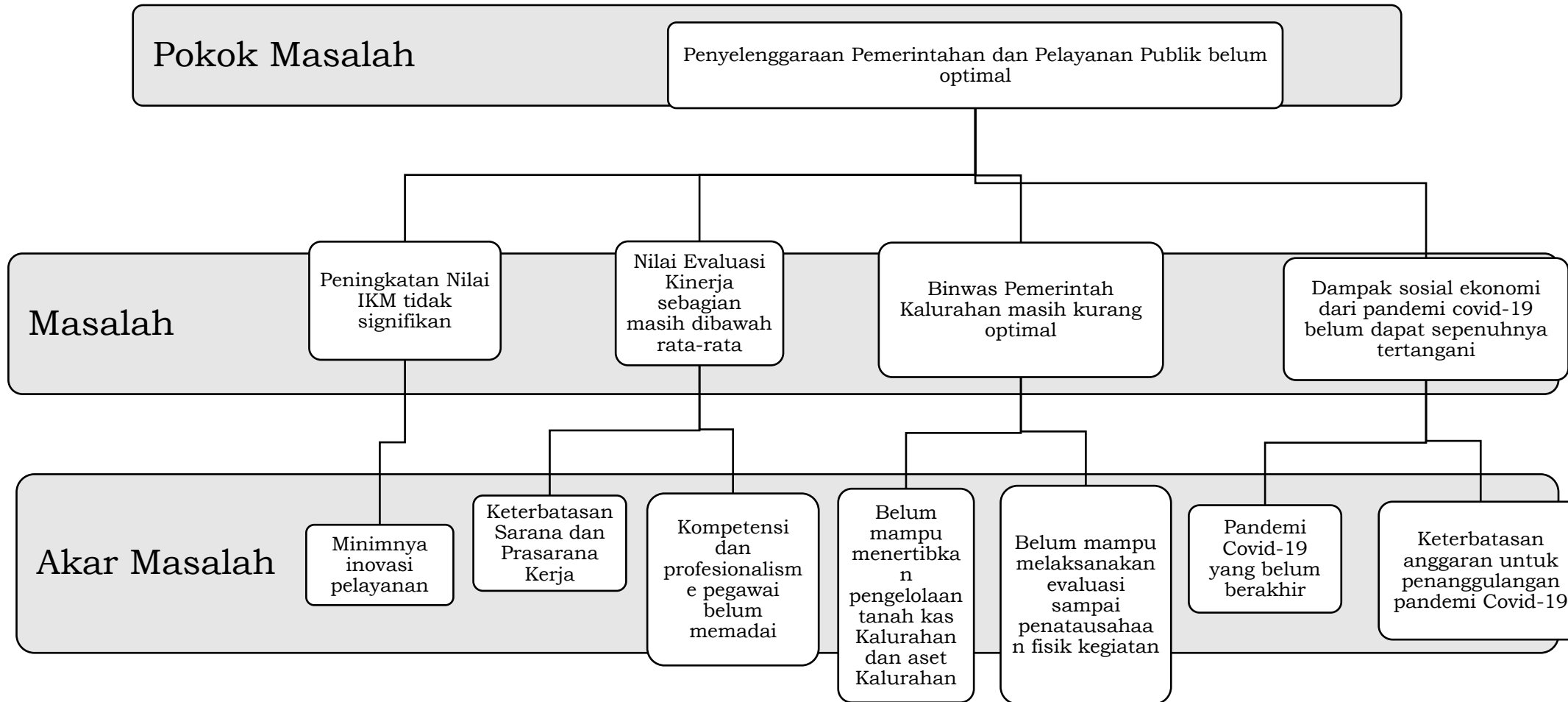
- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon DLingo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut

Gambar 3. 1  
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur	1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Keterbatasan sarana prasarana
			2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 3. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;
		b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi,	1. Dukungan dan pembinaan petugas	1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	instansi terkait.	tentang regulasi terkait;
			2. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;	2. Keterbatasan sarana prasarana
			1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon	1. Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.
		c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat	2. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	2. Keterbatasan sarana prasarana;
			3. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	
			4. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten



Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon DLingo, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung Peningkatan dan Pengembangan SDM terutama SDM di Kapanewon dan Kalurahan
2. Dukungan Penganggaran Pemulihan dampak Pandemi Covid-19
3. Mendukung tambahan sarana Prasarana dalam penyelenggaraan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat
4. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;
5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra K/L**

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi:
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
    3. Indeks Kinerja ORMAS.
  - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
  - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Pengawasan Internal.
  2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

**Tabel 3.3**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
			selalu diperdengarkan setiap jam 08:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.</li> <li>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.</li> <li>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang</li> </ol>	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah</li> <li>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang</li> </ol>	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan</li> <li>2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Dlingo tidak ada Renstra K/L yang terkait langsung.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kaji Lingkungan Hidup Strategis

### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul

yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Dlingo

<b>Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang</b>	<b>Struktur/ Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Dlingo masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Dlingo
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Dlingo	1. Keterbatasan SDM. 2. Perilaku masyarakat, sampah anorganik masih banyak dibakar atau dipendam	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.



Telaah Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perlindungan setempat.</li> <li>2. Kawasan Rawan Bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perlindungan hutan pinus, Tahura</li> <li>2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan</li> </ol>	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan hutan pinus di Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong dan Jatimulyo.</li> <li>2. Kawasan rawan tanah longsor dan kekeringan di hampir semua wilayah</li> </ol>	Keterbatasan Koordinasi	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Peruntukan Pertanian.</li> <li>2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan pertanian lahan kering</li> <li>2. Kawasan peruntukan pariwisata/ Agrowisata (Hutan Pinus)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang.</li> <li>2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalurahan Jatimulyo, Terong, Muntuk, Dlingo</li> <li>2. Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong</li> </ol>	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

### 3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Dlingo sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Dlingo yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di wilayah
- 2) Akses terhadap air minum yang layak belum merata. Beberapa desa kesulitan mengakses air bersih saat musim kemarau.
- 3) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 4) Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibukanya sarana dan prasarana yang mendukung wisata dan belum terintegrasinya wisata yang ada di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Dlingo.
- 5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khususnya kerajinan kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan

dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			(Tahun baseline/ Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Dlingo ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas SDM cukup memenuhi</li> <li>2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya inovasi pelayanan</li> <li>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</li> <li>3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</li> </ol>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi,</li> <li>2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.</li> <li>4. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan</li> <li>5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat <b>(S1,2 - O1- -4)</b></li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S1,2 - O4-11)</b></li> <li>3. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan. <b>(S1,2 - O1-4)</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 <b>(W1-3 - O1-4)</b></li> <li>16. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan yang terdampak covid-19 <b>(W1-3 - O4-11)</b></li> <li>17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan <b>(W1-3 - O4-11)</b></li> <li>18. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p>6. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar</p> <p>7. Pengembangan Produk Andalan Setempat</p> <p>8. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Cagar Budaya</p> <p>9. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Peruntukan Wisata</p> <p>10. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan pertanian lahan kering</p> <p>11. Adanya Dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.</p>	<p>1. Kuantitas SDM cukup memenuhi</p> <p>2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai</p> <p>4. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat <b>(S1,2 - O1-4)</b></p> <p>5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan <b>(S1,2 - O1-4)</b></p> <p>6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat <b>(S1,2 - O1-4)</b></p> <p>7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. <b>(S1,2 - O1-4)</b></p> <p>8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. <b>(S1,2 - O8)</b></p> <p>9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. <b>(S1,2 - O9)</b></p> <p>10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. <b>(S1,2 - O4-9)</b></p> <p>11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan <b>(S1,2 - O5-9)</b></p> <p>12. Peningkatan Ketahanan Pangan <b>(S1,2 - O5-9)</b></p> <p>13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui</p>	<p>1. Minimnya inovasi pelayanan</p> <p>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</p> <p>3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</p> <p>penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. <b>(W1-3 - O4-11)</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas SDM cukup memenuhi</li> <li>2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya inovasi pelayanan</li> <li>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</li> <li>3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p>pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) <b>(S1,2 - O5-9)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. <b>(S1,2 - O5-9)</b></li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.</li> <li>2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan.</li> <li>3. Wilayah Kapanewon Dlingo termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. <b>( S1,2 - T1-3)</b></li> <li>20. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. <b>(S1,2 - T1-3)</b></li> <li>21. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. <b>(S1,2 - T3)</b></li> <li>22. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. <b>(S1,2 - T3)</b></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo <b>(W1,3 - T1-3)</b></li> </ol>



Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada ke dalam tabel berikut:

<b>Strategi Hasil SWOT</b>	<b>Pengelompokan Strategi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat <b>(S1)</b></li> <li>2. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan <b>(S3)</b></li> <li>3. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat <b>(S4)</b></li> <li>4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan <b>(S5)</b></li> <li>5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat <b>(S6)</b></li> <li>6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. <b>(S7)</b></li> <li>7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 <b>(S15)</b></li> <li>8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. <b>(S18)</b></li> </ol>	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat <b>(S1)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S2)</b></li> <li>2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. <b>(S8)</b></li> <li>3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. <b>(S9)</b></li> <li>4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar</li> </ol>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S2)</b></p>

<p>mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. <b>(S10)</b></p> <p>5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan <b>(S11)</b></p> <p>6. Peningkatan Ketahanan Pangan<b>(S12)</b></p> <p>7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) <b>(S13)</b></p> <p>8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. <b>(S14)</b></p> <p>9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 <b>(S16)</b></p>	
<p>1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. <b>(S19)</b></p> <p>2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. <b>(S21)</b></p> <p>3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. <b>(S22)</b></p>	<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. <b>(S19)</b></p>
<p>1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan <b>(S17)</b></p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo <b>(S23)</b></p>	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum <b>(S23)</b></p>
<p>1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. <b>(S20)</b></p>	<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan <b>(S20)</b></p>

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dlingo

<b>VISI :</b>			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
<b>MISI ke 1 :</b>			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima			
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif</li> <li>- Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan,</li> </ul>

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif</p> <p>- Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.</p>	<p>- Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif</p> <p>- Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.</p>
		<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo</p>	<p>Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</p>	<p>Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas</p> <p>Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif</p>

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:









Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp			
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000			
		7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Meningkatnya Implementasi SAKIP yang berkualitas <b>Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB</b>	80 angka	<b>85 angka</b>	<b>2.860.837.984</b>	<b>86 angka</b>	<b>2.985.290.490</b>	<b>87 angka</b>	<b>3.156.095.490</b>	<b>87 angka</b>	<b>3.336.558.490</b>	<b>88 angka</b>	<b>3.903.320.490</b>	<b>88 angka</b>	<b>16.242.102.944</b>			<b>Kapanewon Dlingo</b>
		7 1 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	79 Angka	100 persen	<b>8.500.000</b>	100 persen	<b>10.000.000</b>	100 persen	<b>10.000.000</b>	100 persen	<b>10.000.000</b>	100 persen	<b>20.000.000</b>	100 persen	<b>50.000.000</b>	<b>Sub Bagian Program Keuangan</b>	<b>Kapanewon Dlingo</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	6 Dokumen	4.250.000													
		7 1 1	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	25.000.000			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen												
							Dokumen Keuangan		37 dokumen	22 dokumen	4.250.000												
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	25.000.000			
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%														
							Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah		100 persen	85 angka	2.338.070.484	80 angka	2.375.870.990	80 angka	2.403.970.490	80 angka	2.454.319.490	80 angka	2.525.394.490	80 angka	12.097.625.944	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo
							dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan		14 kali	14 kali	1.501.559.994								14 kali	1.501.559.994	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
							Pembayaran TPP ASN		12 kali	12 kali	794.690.490								12 kali	794.690.490	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		7	1	1	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima					20 orang bulan	2.300.870.990	20 orang bulan	2.323.970.490	20 orang bulan	2.344.319.490	20 orang bulan	2.365.394.490	20 orang bulan	9.334.555.460		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARG ET	Rp
												TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
								Gaji dan Tunjangan ASN																			
								Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 orang	108 ob	41.820.000									108 ob	41.820.000					
		7	1	1	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	395.000.000						
		7	1	1	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			22 laporan	5.000.000	22 laporan	5.000.000	22 laporan	10.000.000	22 laporan	10.000.000	22 laporan	49.250.000						
		7	1	1	2.06			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja																	
		7	1	1	2.06			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%			100 persen	1.062.500	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	5.000.000	100 persen	16.062.500			Sub bagian Umum dan Kepegawaian			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1.062.500	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	16.062.500			
		7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	165.881.734	100 persen	201.875.000	-	242.125.000	100 persen	295.000.000	100 persen	435.000.000	100 persen	1.362.714.734	Sub bagian Umum dan Kepegawaian		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	12 bulan	6 jenis	10.583.000									6 jenis	10.583.000			
		7	1	1	2.06	01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	15.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	25.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	120.583.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor	15 jenis	13 jenis	21.344.234									13 jenis	21.344.234			
		7	1	1	2.06	02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	30.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	80.000.000	4 paket	200.000.000	
				Penyediaan Peralatan	Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	8 jenis	13.770.000									8 jenis	13.770.000			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	1	1	2.06	03	Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 paket	13.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	25.000.000	4 paket	45.000.000	4 paket	103.000.000		
							Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang cetakan	4 jenis	3 jenis									3 jenis			
								Pengandaan	30.000 lembar	30.000 lembar		10.532.000								30.000 lembar	10.532.000	
		7	1	1	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			4 paket	10.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	45.000.000	4 paket	90.000.000		
								Bahan bacaan langganan surat kabar	3 jenis	1 jenis		2.400.000								1 jenis	2.400.000	
		7	1	1	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	22.500.000		
								Laporan hasil rapat	22 dokumen	40 dokumen										40 dokumen		
								Perjalanan dinas dalam daerah	340 op	300 op		103.002.500								300 op	103.002.500	
							Perjalanan dinas luar daerah	0 op	5 op										5 op			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp								
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		7	1	1	2.06	09			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345 laporan	125.000.000	345 laporan	130.000.000	345 laporan	160.000.000	345 laporan	190.000.000	345 laporan	605.000.000				
							0	2 dokumen	Laporan penataan arsip				4.250.000								2 dokumen	4.250.000				
		7	1	1	2.06	10			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	4.250.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	43.500.000				
									Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.125.000	1 Dokumen	2.125.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	12.250.000				
		7	1	1	2.07				terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
							100 persen	100 persen	Pengadaan Barang Milik Daerah				100 persen	17.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	85.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	324.000.000	Sub Bagian Umum dan	Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp						
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
																				Kepegawaian				
		7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	1 jenis	8.000.000								1 jenis	8.000.000			
		7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	40.000.000	2 Unit	30.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	143.000.000		
		7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	1 jenis	9.000.000									1 jenis	9.000.000		
		7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							2 Unit	40.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	164.000.000		
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan															
								capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	indikator dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	188.128.036	100 persen	205.000.000	100 persen	250.000.000	100 persen	280.000.000	100 persen	365.000.000	100 persen	1.404.276.072	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo
		7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		570 lembar	400 lembar	4.000.000									400 lembar	4.000.000		
								Penyediaan Jasa Komunikasi,		12 bulan	12 bulan	56.200.000									12 bulan	56.200.000		
								Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan										12 bulan			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telephone		12 bulan	12 bulan										12 bulan			
		7 1 1 2.08 02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	335.000.000			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		4 kali	2 jenis	11.780.000									2 jenis	11.780.000		
		7 1 1 2.08 03		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	105.000.000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dokumen										2 dokumen			
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			12 ob	1 dokumen	116.148.036									1 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			24 ob	2 dokumen										2 dokumen			



Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			0 dokumen											0 dokumen			
				Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN		60 ob	60 ob											60 ob			
		7 1 1 2.08 04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	130.000.000	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	170.000.000	5 Laporan	210.000.000	5 Laporan	776.148.036				
		7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	143.257.730	100 persen	151.482.000	100 persen	175.000.000	100 persen	207.239.000	100 persen	457.926.000	100 persen	1.243.885.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo	
		7 1 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		1 unit	1 unit	126.119.400									1 unit	126.119.400			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		6 unit	6 unit										6 unit			
		7	1	1	2.09	02				7 unit	131.482.000	7 unit	150.000.000	7 unit	157.239.000	7 unit	180.000.000	7 unit	744.840.400		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	2 unit	17.138.330												
		7	1	1	2.09	09				2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	277.926.000	2 unit	372.926.000		
		7	01	02	2.01	02															
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kapanewon yang dilaksanakan/jenis layanan standar	90 persen	100 persen	31.995.000	100 persen	45.000.000	100 persen	90.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	145.000.000	100 persen	421.995.000		Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7 01 02 2, 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dan pelayanan publik terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	kapanewon * 100 Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 persen	100 persen	24.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	60.000.000	100 persen	75.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	289.000.000			Kapanewon Dlingo
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6 dokumen	4 Dokumen	9.875.000									4 Dokumen	9.875.000			
		7 01 02 2, 0 1	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	35.000.000	20 Laporan	95.000.000			jawatan keamanan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		6 dokumen	6 Dokumen	14.125.000									6 Dokumen	14.125.000			jawataan praja



Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<b>MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	kepada masyarakat	dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2															
					Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		85 persen	100 persen	138.447.500	100 persen	170.000.000	100 persen	210.000.000	100 persen	240.000.000	100 persen	245.000.000	100 persen	1.003.447.500		Kapanewon Dlingo
		7	01	03	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan													
					Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	100 persen	88.367.500	100 persen	100.000.000	100 persen	130.000.000	100 persen	160.000.000	100 persen	145.000.000	100 persen	641.897.500		Kapanewon Dlingo
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	1 dokumen	18.530.000								1 dokumen	18.530.000	jawatan kemakmuran	
					monev pedukuhan		0	6 Dokumen										6 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	03	2. 01	01				10 lemba ga	20.000.0 00	10 lemba ga	40.000.0 00	10 lemba ga	50.000.0 00	10 lemba ga	35.000.0 00	10 lemba ga	163.530. 000		
							10 dokum en	32 doku men	69.837. 500									32 doku men	69.837.5 00		
		7	01	03	2. 01	03				6 Lapora n	80.000.0 00	5 Lapor an	90.000.0 00	6 Lapor an	110.000. 000	5 Lapor an	110.000. 000	5 Lapor an	390.000. 000	<b>jawatan sosial</b>	
		7	01	03	2, 0 3																
							100 persen	100 perse n	50.080. 000	100 persen	70.000.0 00	100 perse n	80.000.0 00	100 perse n	80.000.0 00	100 perse n	100.000. 000	100 perse n	380.080. 000	<b>Kapanew on Dlingo</b>	
							8 dokum en	5 doku men	50.080. 000									5 doku men	50.080.0 00	jawatan kemakmu ran	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Prgram, Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARG ET	Rp
							TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Ekonomi Masyarakat	usaha masyarakat																	
		7 01 03 2,03 04		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	70.000.000	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	330.000.000					
		7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 persen	100 persen	104.587.000	100 persen	120.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	170.000.000	100 persen	180.000.000	100 persen	694.587.000			Kapanewon Dlingo	
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Perse n	100 Persen	104.587.000	100 Perse n	120.000.000	100 Perse n	120.000.000	100 Perse n	170.000.000	100 Perse n	180.000.000	100 Perse n	799.174.000			Kapanewon Dlingo	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 dokumen	104.587.000									2 dokumen	104.587.000	Jawatan Keamanan			
			Laporan kejadian		2 dokumen	4 dokumen														4 dokumen		







Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sasaran Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Negara Kesatuan Republik Indonesia																	

Keterangan: \*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>A</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03 angka	88,1 angka	88,4 angka	88,8 angka	89,1 angka	89,5 angka	89,5 angka	<b>Kabupaten</b>
<b>B</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	90 angka	90 angka	91 angka	91 angka	92 angka	92 angka	<b>Kapanewon</b>
1	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Praja
2	<b>Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	n/a	-	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	85 persen	jawatan sosial
1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan sosial
3	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Praja
3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	85 angka	86 angka	87 angka	88 angka	89 angka	89 angka	jawatan Pelayanan
4	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Bantul, Juli 2022

Panewu,

.....